

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

19d6b7f2164a4b34b7bcdedea03cba25ecbb0c14fa518854dc5a9b4f8379f9ed

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

INSTRUMEN PENILAIAN KRITERIA DAN INDIKATOR DESA SIAGA API DI KABUPATEN PULANG PISAU

Instruments For Village Preparedness Level In Forest And Land Fire Control In Pulang Pisau Distric

Oleh:

Sari Marlina¹, Rita Rahmaniati²

¹Lecturer in Faculty of Engineering and Informatics, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
RTA Milono St. Km. 1,5, Palangka Raya

²Lecturer in Elementary Teacher Education, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
RTA Milono St. Km. 1,5, Palangka Raya

marlinasari@umpr.ac.id

Diterima 25-08-2022, direvisi 22-12-2022, disetujui 26-12-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh instrument untuk menilai tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla dan untuk mengetahui hasil penilaian tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model penelitian dan pengembangan (R& D) yang diadopsi dari model Borg & Gall. Tahapannya meliputi persiapan, validasi ahli dan uji praktisi, uji coba perangkat, penyempurnaan perangkat, dan perangkat teruji. Hasil pengembangan melalui proses penilaian/validasi ahli dinyatakan layak digunakan sebagai instrument untuk mengukur penilaian tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla dengan kriteria materi baik, konstruksi baik, bahasa dan penulisan dapat di pahami. Selanjutnya hasil uji coba terbatas pada 2 desa menunjukkan bahwa instrument dapat mengukur penilaian tingkat kesiapsiagaan desa siaga api dengan kategori baik (88,75%) dan kategori cukup (11,25%) pada aspek materi, pada aspek konstruksi kategori baik (81,25%) dan kategori cukup (18,75%) sedangkan pada aspek bahasa dan penulisan kategori dapat dipahami (83,75%) dan kategori cukup (16,25%) kategori cukup dapat di pahami. Hasil uji coba terbatas menunjukkan pada Desa Taruna diperoleh hasil sangat siaga 15%, siaga 50%, cukup siaga 25% dan tidak siaga 10% sedangkan pada desa Tumbang Nusa diperoleh hasil sangat siaga 30%, siaga 50%, cukup siaga 20% dan tidak siaga 0%.

Kata Kunci: Instrumen tingkat kesiagaan desa, kebakaran hutan dan lahan

ABSTRACT

This study aims to obtain an instrument to assess the level of village preparedness in controlling forest and land fires find out the results of the assessment of the level of village preparedness in controlling forest and land fires. The method used in this study is a research and development (R&D) model which was adopted from the Borg & Gall model. The stages include preparation, expert validation and practitioner testing, device testing, equipment refinement, and tested equipment. The results of the development through an expert assessment/validation process were declared suitable to be used as an instrument to measure the assessment of the level of village preparedness in controlling forest and land fires with the criteria of good material, good construction, understandable language and writing. Furthermore, the results of the trial limited to 2 villages showed that the instrument was able to measure the level of preparedness in the fire alert village with a good category (88.75%) and a sufficient category (11.25%) in the material aspect, in the construction aspect, the category was good (81.25). % and sufficient category (18.75%) while in the aspect of language and writing the category can be understood (83.75%) and the sufficient category (16.25%) category is quite understandable. The results of the limited trial showed that in Taruna Village the results were very alert 15%, standby 50%, quite standby 25% and not standby 10% while in Tumbang Nusa village the results were very alert 30%, standby 50%, quite standby 20% and not standby 0%.

Keyword: Instruments for Village Level Alertness, Forest and Land Fires

I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terus berulang melanda Indonesia. Di tahun 2019 lalu kebakaran mengakibatkan area terbakar mencapai 1.649.259 hektare (sipongi.menlhk.go.id, 2019). Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia (Nugraha, 2019), di bidang sosial yang dalam hal ini adalah kesehatan masyarakat (Uda, Hein, & Atmoko, 2019), dan keadaan ekologi (Wasis, Saharjo, & Waldi, 2019; Wasis, Winata, & Marpaung, 2018). Selain itu juga mengakibatkan masalah kabut asap bagi negara tetangga, di Asia Tenggara (Rezainy, Syaufina, & Sitanggang, 2020; Rasyid, 2014; Nugroho, 2016; Putra, Ratnaningsih, & Ikhwan, 2018). Pemerintah Indonesia terus berusaha dalam menangani masalah karhutla, salah satunya melalui sistem peringatan dini (*early warning system*), mengkajian evaluasi risiko kebakaran, Infrastruktur pembangunan fisik pencegahan kebakaran hutan seperti embung, *green belt*, peta zonasi wilayah rawan karhutla, penegakan hukum serta keterlibatan masyarakat pada pembentukan kelembagaan atau organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) (Itsaini, Sasmito, Sukmono, & Prasasti, 2017; Chuvieco *et al.*, 2014; Harmizan, 2015). Pelibatan masyarakat, terkhusus pada masyarakat desa dalam pengendalian karhutla telah dicetuskan oleh Kementerian Kehutanan sejak tahun 2009 yang diwujudkan dalam lembaga MPA. Dalam hal ini atas keinginan pemerintah untuk menumbuhkembangkan partisipasi sikap peduli masyarakat desa untuk aktif dalam proses kegiatan pencegahan dan pemadaman dini terhadap kejadian kebakaran (Sawerah & Muljono, 2016; Tampubolon, Aluyah, & Heptiana, 2018).

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Jayarathne *et al.*, 2018; Badan Restorasi Gambut, 2018). Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah setiap

tahun terjadi dan sulit untuk memadamkan karena titik api berada pada kedalaman 3-5 meter di bawah tanah dengan karakteristik tanah gambut yang lebih mudah terbakar dari pada jenis tanah lainnya. Kalimantan Tengah dengan total luas dan sebaran gambut 2,6 juta ha setiap tahun selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2015 hampir 200 ribu ha lahan gambut terbakar (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015).

Masyarakat desa telah diberikan pengetahuan dan pelatihan berkaitan dengan pengendalian karhutla, yang di antaranya bergabung dalam sebuah regu yang berfungsi pengendalian kebakaran di level desa. Masyarakat yang terlibat dalam pengendalian karhutla dikembangkan berbasis desa karena pada kenyataannya wilayah desa adalah wilayah yang terdekat dengan kejadian karhutla. Desa diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pengendalian karhutla. Berdasarkan Keputusan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2018, sebanyak 4.140 desa telah ditetapkan sebagai desa rawan kebakaran. Desa-desa ini telah menjadi sasaran utama dalam upaya pengendalian kebakaran di tingkat tapak namun hingga saat ini belum tersedia sebuah instrumen yang dapat memberikan penilaian tingkat kesiapan atau kesiagaan desa dalam pengendalian karhutla di wilayahnya. Oleh karena itu, penyusunan instrumen/ perangkat untuk menilai tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian karhutla menjadi suatu hal yang penting. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana instrumen untuk menilai tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla?
2. Bagaimana penilaian tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla?

Tujuan Penelitian mengacu pada rumusan masalah yaitu untuk:

1. Menyusun instrumen kriteria dan indikator

untuk menilai tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla

2. Mengetahui hasil penilaian tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla

Penelitian ini penting dilakukan mengingat perlunya mengetahui kesiapsiagaan Desa yang selama ini menjadi “langganan” terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, sehingga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten pulang Pisau dapat diminimalisir.

Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008). Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api (Notohadinegoro, 2006). Kebakaran yang terjadinya akibat kesengajaan manusia dikarenakan oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan ladang, perkebunan (PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya (Hatta, 2008).

Kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap musim kemarau pada kabupaten Pulang Pisau memerlukan penanganan yang serius dan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat selain regu pemadam yang sudah bertugas. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

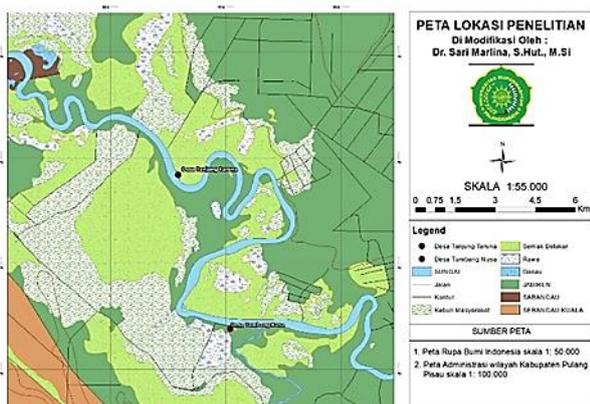
II. METODOLOGI

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada bulan Mei sd Oktober 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau pada 2 (dua) lokasi yaitu :

1. Desa Tanjung Taruna
2. Desa Tumbang Nusa,

dipilih sebagai lokasi dan sumber penelitian karena kabupaten tersebut merupakan luasan (hektar) tertinggi kejadian kebakaran lahan gambut tahun 2015. Secara keseluruhan data luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dari tahun 2015–2019 adalah tahun 2015 seluas 583.833,44 ha, tahun 2016 seluas 6.148,42 ha, tahun 2017 seluas 1.743,82 ha, tahun 2018 seluas 47.432,57 ha, dan tahun 2019 seluas 303.881,00 ha. Kondisi rawan api tertinggi di Kalimantan tengah, berada di dua kota atau kabupaten yang berdampingan: Pulang Pisau dan Palangkaraya. Sepanjang Januari 2015 sampai Agustus 2019, Palangkaraya juga jadi daerah dengan hotspot tertinggi, yaitu 902, dari total 3.380 hotspot, salah satunya terdapat di Pulang Pisau 582 hotspot. Penelitian tahap awal berupa penyusunan instrumen yang terdiri dari kriteria dan indikator tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian karhutla. Instrumen ini kemudian diujicobakan. Uji coba instrumen dilakukan pada 2 (dua) desa tersebut. Setelah uji coba instrumen, tahap selanjutnya adalah implementasi instrument pada desa-desa ini termasuk kategori desa rawan kebakaran berdasarkan Keputusan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan SK No. 9 Tahun 2018. Kondisi desa umumnya pernah mengalami kebakaran di wilayah desa.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
 Figure 1. Map of Research Locations

Metode Penelitian

Penyusunan kriteria dan indikator tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian karhutla yang diberi istilah Kriteria Indikator Desa Siaga Api (KI DSA) menggunakan model penelitian dan pengembangan (R& D) yang diadopsi dari model Borg & Gall. Tahapannya meliputi:

- 1) persiapan,
- 2) validasi ahli dan uji praktisi,
- 3) uji coba terbatas perangkat, (Setyosari, 2015)

Tahap persiapan adalah menyusun rancangan kriteria dan indikator yang digunakan. Untuk membentuk struktur KI DSA maka terlebih dahulu mempelajari referensi terkait standar atau kriteria dalam pengendalian kebakaran hutan dan program berbasis desa yang telah dikembangkan pemerintah selama ini. Program-program dimaksud di antaranya adalah Desa Mandiri Pangan (Demapan), Desa Model Konservasi, Program Kampung Iklim, serta Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai data sekunder.

Kemudian penyusunan struktur KI DSA harus menyeluruh terdiri atas unsur-unsur (sub-sub sistem) yang ada pada desa sebagai sebuah sistem pengendalian karhutla di level tapak, terdiri dari unsur sosial (social), teknologi (technology), ekonomi (economic), lingkungan (environment), dan kebijakan (policy). Serta data empiris di lapangan lapangan di antaranya adalah partisipasi masyarakat, teknologi

penyiapan lahan tanpa bakar, dan regu pengendali kebakaran sebagai data primer.

Tahap validasi ahli dan uji praktisi merupakan penelaahan terhadap draft perangkat KI DSA. Para ahli yang menelaah berasal dari akademisi, birokrat, praktisi, dan peneliti yang berkompeten di bidang pengendalian karhutla. Mereka menelaah kesesuaian kriteria dan indikator yang digunakan serta memberikan penilaian terhadap bobot masing-masing kriteria dan indikator. Pembobotan akan terkait dengan penghitungan indeks kesiagaan desa dalam pengendalian karhutla. Indeks kesiagaan desa selanjutnya menjadi ukuran dalam penentuan klasifikasi desa, yang mencerminkan tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian karhutla. Instrumen KI DSA selanjutnya diuji coba di 2 (dua) desa ini.

Luaran dari uji coba instrumen ini adalah revisi atau penyempurnaan perangkat KI DSA. Setelah instrumen selesai disusun dan teruji maka instrumen dapat digunakan untuk menilai tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran melalui uji coba terbatas. Selain pengembangan instrumen penilaian, juga dilakukan klasifikasi tingkat kesiagaan desa berdasarkan range nilai indeks keseluruhan dari kombinasi bobot dan nilai kriteria/indikator dalam skala Likert. Klasifikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi desa dalam praktik pengendalian karhutla.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Validasi Ahli

Validasi ahli dilakukan oleh 4 orang validator yang terdiri dari Akademisi, Praktisi, BPBD Prov Kalteng dan Dishut Prov Kalteng. Hasil validasi melalui 3 aspek: Materi, Konstruksi, Bahasa dan penulisan. Rangkuman hasil Validasi ahli di sajikan pada table 1 berikut

Aspek	Penilaian Validator/ Persentase		
	Materi	Konstruksi	Bahasa & Penulisan
Validator 1	Baik (100%)	Baik (65%), Cukup (35%)	Dapat Dipahami (75%), Dapat (25%)
Validator 2	Baik (85%), Cukup Baik (15%)	Baik (80%), Cukup Baik (20%)	Dapat Dipahami (80%), Dapat (20%)
Validator 3	Baik (70%), Cukup Baik (30%)	Baik (80%), Cukup Baik (20%)	Dapat Dipahami (80%), Dapat (20%)
Validator 4	Baik (100%)	Baik (100%)	Dapat Dipahami (100%)

Catatan Validator pada Kriteria 1, Indikator 1.1, Indikator 1.2, Alternatif Jawaban Pertanyaan 1 dan 2, dan Perbaikan Kalimat Pertanyaan Nomor 3.

Kriteria 1 perlu di formulasi ulang sehingga bisa difahami dengan mudah dan mencapai tujuan

Alternative jawaban 3 dan 4 memiliki kesamaan pada sub indikator dapat disebutkan lokasi kejadian kebakarannya. Penggunaan kata “lahan dan hutan” hendaknya menggunakan kata umum seperti “Hutan dan Lahan”.

Pada kriteria 2, indikator 2.1, indikator 2.2, dan alternatif jawaban 2 dan 3 pada pertanyaan 8.

Kriteria 2 indikator 2.1, pengertian PLTB tertulis Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) diubah menjadi “Pembukaan Lahan Tanpa Bakar: sesuai dengan permen LHK No 32/ment.HK/Setjen/Kum.1/3/2016 tahun 2016

Alternative jawaban 2 dan 3 memiliki kesamaan, deskripsi skor 4 belum ada, dapat ditambahkan.

Pada Kriteria 3, Alternatif Jawaban 1 dan 3 pada Pertanyaan 9, dan Alternatif Jawaban 1 pada Pertanyaan 11.

Tanda > diganti dengan tanda ±

Pada jawaban 3 50% diganti dengan 25%.

Alternatif jawaban 1 perlu di cermati kembali karena tidak sejaja dengan alternative jawaban lainnya.

Validator pada kriteria 4, Indikator 4.4, dan Alternatif Jawaban 4 pada Pertanyaan 16.

Tidak ada ketersediaan dana khusus untuk pengendalian karhutla, serta untuk sekarang Desa BELUM menganggarkan untuk kegiatan Karhutla.

Deskripsi skor 4 pada soal 16 masih kosong, dapat dilengkapi

Deskripsi skor 2 pada soal 17 masih kosong, dapat dilengkapi.

Perbaikan pada alternatif Jawaban 2 pada Pertanyaan 17, Alternatif Jawaban 3 pada Pertanyaan 18, dan Alternatif Jawaban 2 pada Pertanyaan 19. Butir soal 20 perlu direvisi karena kurang lengkap.

Catatan dari masing-masing Validator selanjutnya direkap dan dijadikan tim peneliti rujukan untuk perbaikan instrument. Setelah dilakukan perbaikan, instrumen kembali diserahkan ke validator untuk di cermati kembali sehingga dinyatakan layak dan valid untuk digunakan ke lapangan melalui tahapan penelitian.

Uji Coba Terbatas

Ujicoba terbatas dilakukan pada masyarakat desa Karang Taruna dan desa Tumbang Nusa berjumlah 10 orang, yang terdiri dari petani, penggarap tanah, dan swasta. Dari Hasil uji Coba terbatas diperoleh 2 macam data. 1) Data berkaitan dengan instrument penilaian kriteria & indikator desa siaga api 2) data hasil penilaian kesiapsiagaan desa siaga api.

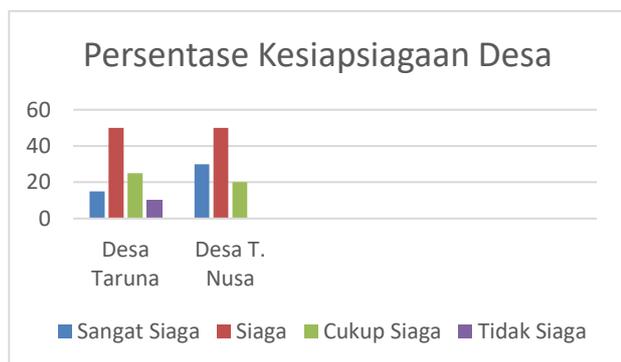
Instrumen setelah di sebarakan terbatas pada subjek ujicoba mendapatkan masukan diantaranya 1) bahasa dalam instrument tidak dipahami masyarakat, penggunaan istilah dapat dijabarkan pada awal instrument sehingga masyarakat tidak kebingungan, kalimat

pertanyaan kurang sederhana, dan kurang lengkap, pada butir-butir tertentu pertanyaan memiliki maksud yang sama. Dari 20 butir soal terdapat 12 soal yang perlu perbaikan yaitu pada butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 dan 20. Hasil uji coba terbatas dijadikan dasar perbaikan kesempurnaan instrument sehingga diperoleh instrument yang layak untuk digunakan pada uji lapangan diperluas.

Adapun Hasil penilaian kesiapsiagaan desa siaga api pada desa Taruna dan desa Tumbang Nusa di sajikan pada Tabel 2 berikut:

Kriteria	Desa Taruna	Desa Tumbang Nusa
Sangat Siaga	15%	30%
Siaga	50%	50%
Cukup Siaga	25%	20%
Tidak Siaga	10%	0%

Data juga disajikan dalam gambar 2 berikut:



Gambar 2 Persentase Kesiapsiagaan Desa Siaga Api

Figure 2 Percentage of Preparedness of Fire Alert Villages

Dari hasil uji coba terbatas pada 2 desa di kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa instrument mampu mengukur secara kualitatif kesiapsiagaan desa dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam ikut menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di 2 desa masih tergolong tinggi.

Menurut Notoadmodjo (2007: 100), ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi, adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial ekonomi Kondisi sosial

ekonomi meliputi tingkatan pendapatan, tingkatan pendidikan.

2. Faktor Politik Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

a) Komunikasi Politik Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. (Dan Nimmo 2000:8).

b) Kesadaran Politik Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan. Menurut (Miriam Budihardjo 1985:119).

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan fisik individu, jenis kelamin, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok.

4. Faktor Nilai dan Budaya

Nilai budaya politik atau silvic culture merupakan bisnis yang membentuk demokrasi, pada hakikatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap dan kepercayaan politik. Menurut Plumer (dalam suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah :

- Pengetahuan dan Keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak

terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

- Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikit waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
- Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
- Jenis Kelamin.
Sudah Sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.
- Kepercayaan terhadap kebudayaan tertentu.
Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metode yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Adapun tugas dan kegiatan masyarakat peduli api menurut Sunanto (2017) yaitu, Kegiatan Pra Kebakaran atau Pencegahan :

1. Membantu SATLAKDALKARHUTLA kecamatan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di desa/Kelurahan tentang pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

2. Mengadakan pengawasan dan pemantauan terhadap hutan dan lahan di Desa/Kelurahan masing-masing pada musim kemarau.

Kegiatan saat terjadi kebakaran hutan, meliputi kegiatan – kegiatan :

1. Melaporkan kepada SATLAKDALKARHUTLA kecamatan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, baik yang sudah dapat di tanggulangi maupun yang belum ditanggulangi.
2. Melakukan penanganan kebakaran apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan kecil maupun besar.

Kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan, meliputi kegiatan – kegiatan

1. Mengadakan pendataan lahan yang akan dilakukan pembakaran dan memantau serta memerintahkan kepada pemilik lahan untuk menjada selama pembakaran berlangsung.
2. Membuat kesepakatan Desa/adat dan sanksi-sanksinya kepada pelaku pembakaran yang tidak mengindahkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan.

Selain partisipasi masyarakat, pemerintah juga memiliki peranan penting. Pencegahan kebakaran telah diupayakan pemerintah melalui penetapan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar "zero burning policy" yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Peranan menurut Soekanto (2001:213) adalah: "Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan

suatu peranan”.

Menurut Soekanto (2001:213) mencakup sedikit tiga pengertian:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Fungsi pemerintah desa harus diwujudkan dalam interaksi antara individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. Veitzal Rivai, 2004:53). Secara operasional fungsi pemerintah dan dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Instruksi Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dikerjakan secara efektif.
2. Fungsi Partisipatif Dalam menjalankan fungsi pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakat, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
3. Fungsi delegasi Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik meliputi persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah, fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
4. Untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat haruslah diberikan informasi tentang arti pentingnya dalam penanganan

kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan komunikasi, adaptasi, kerjasama yang nantinya masyarakat akan mengerti dan memahami hakikat pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengertian Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Menurut Darwiati dan Tuheteru (2010) di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan hampir 99% diakibatkan oleh kegiatan manusia baik disengaja maupun tidak (unsur kelalaian). Diantara angka persentase tersebut, kegiatan konversi lahan menyumbang 34%, peladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, proyek transmigrasi 8%; sedangkan hanya 1% yang disebabkan oleh alam. Faktor lain yang menjadi penyebab semakin hebatnya kebakaran hutan dan lahan sehingga menjadi pemicu kebakaran adalah iklim yang ekstrim, sumber energi berupa kayu, deposit batubara dan gambut.

Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Setiap tahun kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan yang sering terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor kelalaian ataupun kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar besaran yang 5 dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan secara ilegal, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi) (Qodriyatun, 2014). Kebakaran hutan terjadi akibat adanya pembersihan lahan (land clearing) dan konservasi hutan menjadi perkebunan dengan cara membakar seresah, daun dan sisa tumbuhan. Metode pembakaran ini merupakan metode yang paling murah, mudah dan efisien. Namun akibat tidak terkendalinya pembakaran tersebut, api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran (Nugroho, 2000). Faktor cuaca juga

merupakan faktor penting yang menyebabkan kebakaran hutan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban relatif. Waktu juga mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan, karena waktu sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Waktu dipisahkan atas waktu siang dan malam hari. Terdapat hubungan antara waktu dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan. Faktor topografi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan mencakup tiga hal yaitu kemiringan, arah lereng dan medan. Masing- masing faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan lahan (Hatta, 2008). Kebakaran hutan telah menjadi masalah tahunan yang serius di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada daerah kejadian saja, tetapi juga berdampak kepada negara tetangga (Nasution et al., 2013). Penyebaran konsentrasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan sangat luas hingga menutupi beberapa wilayah di negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya jarak pandang (visibility), transportasi udara dan darat yang terganggu, meningkatnya penderita infeksi saluran pernapasan atas, dan masalah-masalah sosial ekonomi di masyarakat (Nugroho, 2000). Dampak asap akibat kebakaran menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma bronkial, bronkitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit. Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas (Perwitasari dan Sukana, 2012).

Selain asap akibat kebakaran yang mengganggu kesehatan masyarakat, serta sarana transportasi baik darat, perairan, maupun udara, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan juga cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah,

perubahan iklim mikro maupun global (Saharjo dan Gago, 2011). Berbicara mengenai produktivitas tanah, kebakaran hutan biasanya menimbulkan dampak langsung terhadap kematian populasi dan organisme tanah serta dampak yang lebih signifikan lagi yaitu merusak habitat dari organisme itu sendiri. Perubahan suhu tanah dan hilangnya lapisan serasah, juga bisa menyebabkan perubahan terhadap karakteristik habitat dan iklim mikro. Kebakaran hutan menyebabkan bahan makanan untuk organisme menjadi sedikit, kebanyakan organisme tanah mudah mati oleh api dan hal itu dengan segera menyebabkan perubahan dalam habitat, hal ini kemungkinan menyebabkan penurunan jumlah mikroorganisme yang sangat besar dalam habitat. Efek negatif ini biasanya bersifat sementara dan populasi organisme tanah akhirnya kembali menjadi banyak lagi dalam beberapa tahun (Hatta, 2008).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Instrumen untuk menilai tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla telah dinyatakan layak dan valid oleh Validator
2. Hasil penilaian tingkat kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla pada uji coba terbatas di kabupaten Pulang Pisau Desa Taruna sangat siaga 15%, Siaga 50%, cukup siaga 25% dan tidak siaga 10% dan Desa Tumbang Nusa, sangat siaga 30%, siaga 50%, Cukup siaga 20% dan Tidak siaga 0%.

Dengan demikian instrument yang digunakan dapat mengukur penilaian terhadap kesiapsiagaan desa dalam pengendalian karhutla.

SARAN

Penilaian perangkat KI DSA memerlukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Dikarenakan kriteria-indikator yang digunakan

mengandung aspek dinamis sehingga tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian karhutla dapat berubah seiring berjalannya waktu dan adanya intervensi dari pihak-pihak terkait terhadap desa. Terkait dengan kebijakan pengendalian kebakaran, perlu upaya pengarusutamaan desa menjadi basis pengendalian kebakaran di tingkat tapak. Pendekatan pencegahan kebakaran dapat menggunakan alternatif lain yaitu dengan model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mata pencaharian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan. (2008). *Pedoman umum program aksi desa mandiri pangan*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Budiardjo, Miriam, 1985, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; PT.Gramedia Pustaka Utama
- Budiningsih, K. (2017). Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Povinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 165–186.
- Budiningsih, K., Setiabudi, I. M., & Septina, A. D. (2020a). Fire care community development in Batanghari District and Tanjung Jabung Timur District in Jambi Province: an overview. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences* 487/012020.
- Budiningsih, K., Setiabudi, I. M., Suryandari, E. Y., Djaenudin, D., & Iqbal, M. (2020). KRITERIA DAN INDIKATOR TINGKAT KESIAGAAN DESA DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol*, 17(2), 123-139.
- Budiningsih, K., Suryandari, E. Y., & Septina, D. (2020b). Gaya Kepemimpinan MPA dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallaceae*, 9(2), 151–164.
- Chuvieco, E., Aguado, I., Jurdao, S., Pettinari, M. L., Yebra, M., Salas, J., . . . , Martinez-Vega, F. J. (2014). Integrating geospatial information into fire risk assessment. *International Journal of Wildland Fire*, 23(5), 606–619.
- Dan Nimmo; 2000. Penerjemah: Tjun Surjaman. Pengarang, Nimmo, Dan. EDISI, Cet. 2. Penerbitan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Desa Siaga Api – Kriteria dan Indikator. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Buku IPB Press: 2020
- Evayanti, T., & Zulkarnaini. (2014). Partisipasi Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8(1), 1–11.
- Harmizan. (2015). Upaya preventif Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2012-2013. *Jom FISIP*, 2(2), 1–13.
- Hatta, M. 2008. Dampak kebakaran hutan terhadap tanah di kecamatan basitang Kabupaten Langkar. Skripsi. Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
- Nasution, et Al, 2012. Emisi Co2 akibat Kebakaran Hutan di Propinsi Riau (Studi kasus di Kabupaten Siak) *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 13 No. 1, Februari 2013, hlm. 27-36

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Rektor UM Palangka Raya telah mendukung kegiatan Penelitian Kompetitif Dosen Internal.
2. Kepala LP2M yang telah mendukung segala kegiatan PKDI ini
3. TIM Peneliti dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini.

- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta : Jakarta
- Nugraha, R. P. (2019). Analisis kerugian ekonomi pada lahan gambut di Kecamatan Pusako, dan Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, 2(2), 1–14. Retrieved from <https://doi.org/10.29244/jaree.v2i2.26072>
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12 / Menhut II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan atau lahan
- Perwitasari, D., sukana, 2012. Gambaran kebakaran hutan dengan kejadian ispa dan pdeumoniadi kabupaten batang hari, provinsi Jambi tahun 2008 jurnal ekologi Kesehatan jakarta. Vol.11.No.2.147.
- Putra, A., Ratnaningsih, A. T., & Ikhwan, M. (2018). Pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sistem informasi geografis (Studi Kasus: Kecamatan Bukit Batu, Kab. Bengkalis). *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 13(1), 55–63.
- Qodriyatun, S. N. 2014. Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosiding Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Peneliti Madya bidang Kebijakan Lingkungan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Vol 6(6): Hal :9-12.
- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. *Jurnal Lingkar Widwaswara*, 1(14), 47–59. Rezainy, A., Syaufina, L., & Sitanggang, I. S. (2020).
- Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta:Grafindo. Yuwono, Sony, dkk. 2002.
- Saharjo, B. H dan C. Gago, 2011. Suksesi Alami Paska Kebakaran pada Hutan Sekunder di Desa Fatuquero, Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera-Timor Leste. *Silvikultur Tropika*, 2(1), pp.40–45.
- Soekanto, Soerjono. 2001. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada. Nainggolan, Togar. 2005.
- Sunanto. 2008. Tesis. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penganggulangan Kebakaran Lahan (Studi Kasus Kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat). Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2008
- Suryawan. (2004). Tingkat pekerjaan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Sutopo Purwo Nugroho, 2000. Minimalisasi Konsentrasi Penyebaran Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Metode Modifikasi Cuaca *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, Vol. 1, No. 1, 2000: 1-8. Jakarta

